

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi adalah sekumpulan orang yang saling bekerjasama serta memiliki kesamaan visi dan misi (Aha, 2017). Berdasarkan tujuan, organisasi diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu organisasi publik dan organisasi non-publik atau organisasi privat (Saktihairil, 2015). Organisasi non- publik disebut juga sebagai organisasi privat atau swasta merupakan organisasi sektor perdagangan barang atau jasa yang memiliki orientasi tujuan menghasilkan *profit* (Halimtrinanta, 2016). Sedangkan organisasi publik merupakan organisasi yang memiliki orientasi tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat/*non-profit oriented* (Yanuar, 2017). Organisasi publik disebut juga sebagai organisasi pemerintah.

Dalam praktiknya, setiap organisasi yang terbentuk akan memiliki sistem pengelolaan atau sistem *management* dalam kegiatan operasional yang dilakukan diberbagai bidang yang dibutuhkan. Akhir dari penerapan sistem tersebut adalah dilakukannya evaluasi yang didahului dengan proses pelaporan dan pemeriksaan atau audit. Sistem keuangan yang dijalankan oleh suatu organisasi selalu mendapatkan perhatian khusus. Kerentanan terhadap penyelewengan dan fungsi utama sebagai pendukung berjalannya aktivitas operasional menjadi alasan utama bagian keuangan mendapat tingkat monitor yang lebih tinggi dibandingkan dengan bidang lainnya. Oleh sebab itu, disusunlah aturan-aturan yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan yang bersifat *managerial* dan menjadi sistematika pelaporan.

Organisasi sektor pemerintah memiliki tingkat monitoring publik yang cukup tinggi mengingat orientasi tujuan organisasi ini terbentuk bukan untuk mendapatkan *profit* melainkan untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat disuatu negara. Pembagian organisasi sektor pemerintah terdiri dari

organisasi pemerintah pusat dan organisasi pemerintah daerah yang tersusun atas unit-unit kecil organisasi didalamnya. Seperti organisasi pada umumnya, organisasi pemerintah memiliki pengelolaan yang berpedoman pada suatu aturan yang telah disepakati bersama terkhusus pada pengelolaan keuangan yang harus dikomunikasikan kepada publik.

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan aturan tertulis yang digunakan sebagai acuan atau tuntunan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah. Kesesuaian penyusunan laporan keuangan terhadap standar menjadi penting karena standar dibuat dengan kesepakatan bersama pihak yang berkepentingan dan bersifat umum sehingga *output* dari penerapan standar tersebut dapat diperbandingkan dan dipertanggungjawabkan kepada khalayak dan pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan uang negara yang didapatkan dari rakyat dan atas pengelolaan sumber-sumber signifikan yang menguasai hajat hidup orang banyak dengan pemisahan manajemen dan kepemilikan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi tuntutan publik terhadap laporan keuangan pemerintah yang mencerminkan baik buruknya kinerja pemerintah dengan dukungan opini audit BPK.

Fenomena peningkatan kasus korupsi oleh aparatur pemerintah daerah terutama pada kasus OTT kepala daerah dan anggota DPRD besar-besaran diakhir tahun 2018 hingga awal tahun 2019 merupakan salah satu cerminan dari pengelolaan keuangan yang buruk sehingga berdampak pada pelaporan keuangan yang buruk terkait dengan penggunaan keuangan daerah. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan daerah. Sektor akuntansi memiliki peranan penting didalamnya, salah satu diantaranya adalah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah. Namun, dalam praktiknya tidak lepas dari pengaruh perilaku *management* sebab penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tidak lepas dari faktor non-akuntansi berelasi yang mempengaruhi seperti kemampuan sumber daya manusia, sistem pengendalian yang diterapkan, dan visi misi organisasi.

Selain standar atau aturan, sistem pengendalian internal menjadi komponen penting yang mendukung terlaksananya sebuah standar dalam topik bahasan ini adalah standar akuntansi pemerintah. Menurut Herawati (2014) sistem pengendalian internal merupakan implementasi dari sitematika yang dibuat dalam rangka mengelola yang diwujudkan dalam tindakan sistematis diterapkan oleh seluruh pimpinan dan anggota organisasi. Tujuan dari penerapan sistem pengendalian internal adalah terciptanya ketaatan terhadap prosedur yang telah dibuat dan disepakati bersama sehingga visi misi dapat terlaksana dan tercapai.

Berdasarkan fenomena dan kepentingan tersebut, maka disusunlah penelitian yang berjudul “Standar Akuntansi, Kompetensi Aparatur, dan Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Daerah Kota Batu”. Selain didasarkan pada fenomena umum yang terjadi, penelitian ini juga dilakukan untuk menguji kembali beberapa hasil penelitian sebelumnya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang hasilnya tidak konsisten. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Rasyid (2019), Hadi dan Darwanis (2017), Hasyim dan Nadir (2017), Muchlis dkk (2016), Sandanafu (2016), Fikri (2016), Inapty dan Martiningsih dkk (2016), dan Rahayu dkk (2014) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia atau aparatur berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, pendapat ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Marfuah dan Alminanda (2018), Sanjaya dan Haryani (2017), dan Triwahyuni (2016) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia atau aparatur tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, peranan moderasi komitmen organisasi telah dipakai dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, dan kompetensi aparatur terhadap kualitas laporan keuangan tetapi masih sedikit dipakai dan menunjukkan hasil tidak mempengaruhi hubungan. Hasil ini terjadi karena sebelum pengujian untuk mengetahui kuat lemahnya suatu hubungan (moderasi)

kompetensi aparatur terhadap kualitas keuangan telah menunjukkan hasil tidak berpengaruh sehingga komitmen pemoderasi dinyatakan tidak berpengaruh. Oleh sebab itu, untuk membuktikan kembali ada tidaknya pengaruh dan hubungan kuat atau lemahnya variabel independen terhadap variabel dependen beserta pemoderasi tersebut maka dilakukan penelitian kembali yang merupakan adaptasi penelitian sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Apakah Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Batu?
2. Apakah kompetensi aparatur pemerintah Kota Batu berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Batu?
3. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Batu?
4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Batu?
5. Apakah komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Batu?
6. Apakah komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan kompetensi aparatur Pemerintah Kota Batu terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Batu?
7. Apakah komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Batu.
2. Mengetahui pengaruh kompetensi aparatur Pemerintah Kota Batu terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Batu.
3. Mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Batu.
4. Mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Batu
5. Mengetahui komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Batu.
6. Mengetahui komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan kompetensi aparatur Pemerintah Kota Batu terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Batu.
7. Mengetahui komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan akuntansi *Public Sector* maupun *management Public Sector*.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti merupakan implementasi dari teori *Public Sector Accounting* yang telah didapatkan selama proses *study*.

- b. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan bahan referesi penelitian yang sejenis untuk dikembangkan.
- c. Bagi Pemerintah Kota Batu diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan bahan kajian untuk evaluasi terkait dengan penyusunan laporan keuangan selanjutnya.
- d. Bagi pembaca secara umum dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan terkait dengan kondisi penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, kompetensi aparatur pemerintah, dan Sistem Pengendalian Internal yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi.